



**Judul** : Parlemen Kebut Sembilan RUU  
**Tanggal** : Rabu, 17 Mei 2023  
**Surat Kabar** : Hukum Online  
**Halaman** : 14

# Parlemen Kebut Sembilan RUU

Produk undang-undang yang berkualitas masih menjadi problem legislasi

**Lailatul Anisah**

JAKARTA. Memasuki masa persidangan kelima tahun 2022-2023, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan membahas sembilan Rancangan Undang-Undang (RUU).

Adapun RUU tersebut merupakan pekerjaan rumah DPR yang mesti diselesaikan mengingat tahun ini merupakan tahun politik. Di masa ini, fokus para anggota DPR sangat rawan terpecah.

Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan, pada masa persidangan ini, DPR bersama Pemerintah dan DPD RI akan memprioritaskan menyelesaikan pembahasan sembilan RUU (*lihat tabel*).

"RUU tersebut yang saat ini masih berada pada Pembicaraan Tingkat I dan RUU lainnya, masuk dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2023," ucap dia, Selasa (16/5).

Puan mengemukakan, DPR berkomitmen untuk menghasilkan produk Undang-Undang (UU) yang selaras dengan UUD 1945, memiliki landasan sosiologis yang kuat, mengutamakan kepentingan nasional dan ikut membuka ruang bagi partisipasi pendapat masyarakat.

## Kualitas UU

Namun pembentukan UU yang dilakukan DPR dan pemerintah belakangan ini terkesan terburu-buru dan memicu polemik di masyarakat. Alhasil, kualitas UU tersebut pun dipertanyakan.

Apalagi, menjelang akhir masa jabatan DPR dan pemerintah, masih banyak RUU yang akan dibahas dan disahkan. Padahal, calon beleid ini krusial bagi masyarakat.

Pengamat Hukum Tata Negara Universitas Andalas Feri Amsari menilai, komitmen

Program Legislasi Nasional (Prolegnas) dalam membahas RUU yang berkualitas masih menjadi problem.

Menurut Feri, pembahasan Prolegnas selama ini hanya berkaitan dengan kepentingan politik, bukan berdasarkan kepentingan publik. "Itu problem legislasi kita, karena tak ada tanggung jawab personal maupun kelembagaan terha-

dap UU yang sudah dirancang namun gagal menjadi UU yang baik dalam implementasinya," kata Feri.

Dia bilang, hal ini pula yang membuat banyak produk hukum di Indonesia yang manfaatnya tidak berdampak langsung kepada masyarakat. Hal ini seharusnya menjadi catatan bagi pendidikan politik di masa depan.

## RUU Prioritas Yang Akan Diselesaikan Pemerintah dan DPR

1. RUU tentang Desain Industri
2. RUU tentang Kesehatan
3. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
4. RUU tentang Hukum Acara Perdata
5. RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

6. RUU tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
7. RUU tentang Energi Baru dan Energi Terbarukan
8. RUU tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak
9. RUU tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Sumber: Badan Legislasi DPR, Riset KONTAN